

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara mencakup reformasi di bidang pelaporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 30, 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam Pasal 30 dan 31 dinyatakan bahwa Presiden sebagai Kepala Negara dan Juga Kepala Daerah dibawah wewenang Presiden menyampaikan hasil laporan keuangan sebagai wujud dari sebuah pertanggungjawaban akan pelaksanaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang didalamnya berisi Laporan Realisasi Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Karena amanat di dalam Pasal 32 tersebut, kemudian terbit Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang mengatur sebagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan atau disingkat SAP pertama kalinya dengan mengadopsi basis kas menuju akrual. SAP yang berbasis kas menuju akrual ini masih bersifat sementara dalam masa transisi, karena di dalam Pasal 36, Undang- Undang Nomor. 17 Tahun 2003 mengamanatkan penyajian laporan keuangan yang berbasis akrual.

Mengingat hal tersebut, dalam perkembangan berikutnya terbit Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menggantikan PP No. 25 Tahun 2010. SAP yang berbasis akrual dituangkan di dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 yang wajib diterapkan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan tempo selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2015.

Aset tetap berfungsi untuk memaksimalkan nilai ekonomis dan sosial dari penyelenggaraan pemerintahan pada sektor publik, dimana dengan adanya pemanfaatan secara optimal dalam penghitungan maupun pengimplementasian aset tetap secara tepat maka pemerintahan pusat maupun daerah dapat mengoptimalkan pelayanan kepada publik.

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dan salah satu provinsi yang tergolong luas dan tergolong ke dalam suatu daerah yang rata-rata ekonomi tergolong cukup dan pengelolaan kekayaan aset maupun keuangan dengan baik yang didukung oleh salah satu entitas pemerintahan yang memiliki tugas untuk melaksanakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (DPKAD) yang didasari asas otonomi dan tugas pembantuan. BPK menyatakan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang yang dirincikan pada Laporan Keuangan Nomor 71 A/LHP/XVIII.SMG/05/2021 dengan hasil berdasarkan tahun anggaran 2020 sudah mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian

intern dalam penyusunan laporan keuangan atas pengelolaan aset tetap, BPK menilai pengelolaan aset tetap Pemerintah Kota Semarang belummemadai antara lain kapitalisasi atas aset rehabilitasi, sehingga perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusunan Aset Tetap belum akurat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas akuntansi aset tetap berbasis akrual berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Semarang, dimana hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Semarang pada tahun anggaran 2020?
2. Bagaimanakah kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kota Semarang pada TA 2020 dengan SAP?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Untuk mendapatkan pemahaman penerapan akuntansi aset tetap pada

Pemerintah Kota Semarang pada tahun anggaran 2020.

2. Untuk mendapatkan pemahaman kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Pemkot Semarang pada TA 2020 dengan SAP.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam melakukan tinjauan atas pengelolaan Aset Tetap sebagai topik yang akan penulis ambil dan tinjau dalam penulisan karya tulis tugas akhir, penulis membatasi ruang lingkup tinjauan dengan berfokus pada penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020. penulis akan memberikan data berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan serta memberikan sebuah langkah berdasarkan fakta dan data yang akan diambil sebagai alternatif dalam melakukan pengoptimalisasian pemanfaatan aset tetap Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan/atau Milik Daerah.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

- a. Bagi Penulis, Penulis dapat mengimplementasikan pemahaman terhadap mata kuliah Akuntansi Pemerintahan Daerah yang dipelajari selama perkuliahan dan khususnya pada implementasi akuntansi aset tetap berdasarkan SAP yang diimplementasikan berdasarkan metode penelitian.

- b. Bagi Pemerintah Kota Semarang, tinjauan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap implementasi akuntansi aset tetap yang didasarkan pada SAP.
- c. Bagi Masyarakat, tinjauan ini diharapkan dapat menambah referensi terkait akuntansi aset tetap pada instansi pemerintahan berdasarkan SAP.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara umum terkait topik permasalahan dan objek permasalahan yang diambil penulis dalam melakukan penyusunan penulisan karya tulis tugas akhir, dimana bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah,, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan memberikan dasar yang digunakan penulis dalam melakukan tinjauan atas Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Semarang, dimana dasar yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam pengimplementasian kebijakan yang berlaku. Penulis juga akan memberikan data mengenai aset tetap baik secara umum maupun terperinci berdasarkan buku, jurnal ilmiah, maupun data yang diperoleh dari media cetak atau elektronik.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Penulis akan melakukan tinjauan terhadap topik penelitian pada objek karya tulis yaitu Pemerintah Kota Semarang, dimana tinjauan tersebut didukung oleh data dan informasi yang valid mengenai topik yang diambil penulis dimana nantinya akan diuraikan secara mendalam dan dituangkan dalam pembahasanyang sistematis dan efisien. Tinjauan akan dititikberatkan pada pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memberikan ringkasan atau gambaran besar karya tulis tugas akhir yang dibuat oleh penulis yang disajikan secara ringkas, efektif, dan efisien melalui penulisan yang sesuai dengan aturan dan kaidah dalam penulisan karya tulis tugas akhir.